



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama Lembaga : KPU Kota Bandung
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	
01. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1. Pelaksanaan Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dan PAW			
a. Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Terkait Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah Lembaga yang Terfasilitasi dan yang Telah Dibina Terkait Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Lembaga	-
b. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	- Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100 %	
	- Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100 %	
c. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Bandung dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	
d. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100 %	
e. Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	1 Draft	
f. Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	- Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Dokumen (dalam Pilkada)	
	- Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	40 %	
2. Penyusunan Keputusan KPU			
a. Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Bandung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Bandung yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	
b. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	- Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97 %	
	- Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	93 %	
3. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum			
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	- Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	3 Perkara	
	- Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 Perkara	
	- Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90 %	
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
a. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	95 %	
b. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	95 %	

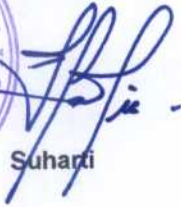
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	
c. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	- Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	95 %	
	- Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	95 %	
	- Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	95 %	
d. Pendidikan Pemilih Kepada wilayah dengan Partisipasi Rendah, wilayah dengan Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan wilayah dengan Rawan Konflik/bencana	Persentase wilayah dengan Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, wilayah dengan Rawan Konflik/Bencana, dan atau wilayah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	95 %	
e. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	- Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	
	- Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa lokal	100 %	
	- Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %	
f. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	95 %	
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik			
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	- Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	90 %	
	- Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %	
	- Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %	
	- Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	-	
a. Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100 %	
b. Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-	
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi			
a. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	- Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	
	- Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100 %	
	- Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	65 %	
b. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal Data dan Informasi	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Data dan Informasi	1 Layanan	-
02. Program Dukungan Manajemen			
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi			
a. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	18 Kegiatan	
b. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 Kali	
c. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	- Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80 %	
	- Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90 %	
d. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase untuk mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90 %	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	
2.Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			
a. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	- Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat - Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	98 % 90 %	
b. Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95 %	
c. Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	80 %	
d. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	150 PPK 453 PPS 64,8 KPPS	
3.Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			
a. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	95 %	
b. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	
c. Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85 %	
d. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95 %	
e. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	- Persentase Kepatuhan dan Ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95 %	
	- Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	12 Laporan	
f. Terlaksananya layanan dukungan manajemen internal perkantoran dalam administrasi keuangan yang tepat	Jumlah layanan perkantoran dalam administrasi keuangan	1 Layanan	
4.Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor			
a. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	85 %	
b. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	- Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	1 layanan
	- Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90 %	
	- Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	80 %	
c. Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	- Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	90 %	
	- Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %	
d. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Bandung	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Bandung yang dapat ditanggulangi	100 %	
e. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	- Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	90 %	1 Unit
	- Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	90 %	
	- Persentase Gedung dan Gudang yang dapat dipenuhi	50 %	
5.Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III			
a. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30 %	
b. Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,4	
c. Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	
d. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90 %	
e. Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	75 %	
f. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	80 %	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan		
a. Peningkatan kompetensi SDM KPU	- Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	70 %
	- Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	-
b. Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen

Bandung, Januari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandung,



Suharti

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandung,



Titon Prayoga